

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam dunia globalisasi pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, dalam arti bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan terutama dukungan dari Pemerintah. Provinsi Jawa Barat melalui program yang telah dicanangkan ada 9 prioritas pembangunan Jawa Barat di tahun 2020, prioritas utama adalah akses pendidikan untuk semua melalui program Perguruan Tinggi Juara dengan menjadikan Perguruan Tinggi yang bermutu sebagai *Center of Excellence and Inovation*. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi adalah manajemen pembiayaan.

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Secara teoritis manajemen pembiayaan Pendidikan mengacu pada konsepsi Thomas. H. Jones (1985) dimana kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan<sup>1</sup>. Teori Thomas H. Jones sering digunakan dalam penelitian karena menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami dan menganalisis manajemen pembiayaan, khususnya dalam konteks pengelolaan dana di sektor publik atau lembaga nirlaba. manajemen pembiayaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi terhadap sumber daya keuangan dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Thomas, H. Jones, *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy* (New York : Macmillan Publishing, 1985), 17.

<sup>2</sup> Hidayat, A., & Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 50.

Teori Jones menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dapat digunakan secara efektif dan mencapai tujuan institusi dengan optimal. Dalam konteks perguruan tinggi, teori ini relevan karena memungkinkan analisis mendalam mengenai bagaimana institusi pendidikan, seperti perguruan tinggi dengan status BLU, dapat memanfaatkan pendapatan mandiri dan anggaran negara secara seimbang. Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan dana yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi, baik dari segi pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan meliputi sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang dapat diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenai manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu Pendidikan.<sup>3</sup>

Manajemen pembiayaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi terhadap sumber daya keuangan dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah seperangkat standar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. SNPT terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar nasional pendidikan tinggi bertujuan untuk menjamin terciptanya tujuan pendidikan yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermutu, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana pada Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 bahwa Standar

---

<sup>3</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 12.

pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Selain itu, Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sekarang menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat<sup>4</sup>. Diperkuat oleh Pasal 49 ayat 1 menyebutkan selain gaji pemerintah minimal mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah minimal mengalokasikan 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan<sup>5</sup>, dana pendidikan diberikan dalam bentuk hibah berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan<sup>6</sup>. Standar Nasional Pendidikan dalam pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 46

<sup>5</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1

<sup>6</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0 20 Tahun 2003 Pasal 47 Ayat 1

investasi meliputi biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji, bahan habis pakai dan biaya tak langsung<sup>7</sup>.

Kebijakan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Ditjen DIKTI selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, Kemendikbud menganggarkan Rp 27,26 triliun untuk pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Sekolah, tunjangan profesi guru, KIP Kuliah dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri<sup>8</sup>.

Anggaran Pendidikan yang sangat besar tersebut akan menjadi sasaran empuk oleh oknum tertentu untuk dilakukan penyalahgunaan. Selain itu anggaran pendidikan yang dialokasikan ke lembaga pendidikan perlu diawasi dan dilakukan monitoring dalam penggunaannya. Manajemen pembiayaan yang dilakukan dengan tidak transparan menimbulkan banyak kecurigaan yang berakibat pada keberlangsungan lembaga pendidikan. Kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam mengawasi manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan dapat menimbulkan tindakan penyelewangan anggaran. Manipulasi laporan keuangan juga menjadi salah satu masalah dalam proses manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan.

Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Pasal 63

<sup>8</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 7 Program Prioritas Pendidikan Mendikbud Nadiem, (diakses tanggal 08/11/2023)

gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis lembaga. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. “Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*Instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggran pendidikan”<sup>9</sup>. Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen pembiayaan yang bagus. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi empirik menunjukkan bahwa penerimaan dana pendidikan sesungguhnya belum dapat memenuhi tuntutan operasional secara ideal. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal yang mempengaruhi penyediaan dana pendidikan seperti terbatasnya dana pemerintah, kebijakan pajak pendidikan belum ditetapkan, kemampuan masyarakat khususnya orang tua masih bervariasi pendapatannya dibandingkan pengeluaran yang harus ditanggulangnya, demikian pula pihak swasta masih belum banyak yang peduli terhadap sumbangan finansial penyelenggaraan pendidikan.

Memperhatikan hal tersebut, dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan yang paling kompleks adalah di perguruan tinggi. Dimana pendidikan diklasifikasikan berdasarkan konsentrasi bidang keilmuan tertentu. Maka sangat wajar apabila perguruan tinggi menjadi pusat perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Itulah salah satu peran dan fungsi perguruan tinggi.

Dengan menyandang peran yang sangat penting tersebut tentunya perguruan tinggi harus menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Sekaligus mampu menjawab segala bentuk tantangan selaras dengan kepentingan rakyat banyak. Peran *agent of change* dapat dijadikan alternatif parameter berdasarkan idiologi perguruan tinggi atau lebih dikenal dengan *Tri Darma Perguruan Tinggi* yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 23.

Dalam melaksanakan *Tri Darma Perguruan Tinggi* tersebut tentunya memerlukan banyak biaya dan harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standar pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi sebagaimana disebutkan di dalam PP Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyatakan bahwa standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.<sup>10</sup>

“Persoalan dana merupakan persoalan yang penting dalam perbaikan dan pembangunansistem pendidikan di Indonesia dana merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan”<sup>11</sup>. Berdasarkan hasil kajian, banyak permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan terkait dengan pembiayaan pendidikan, diantaranya: (1) Pengelolaan pembiayaan tidak sesuai standar, (2) “sumber dana yang terbatas terbatas”<sup>12</sup>, (2) “pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana yang tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan”<sup>13</sup>, (3) kurangnya bantuan pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta akibat otonomi daerah, dengan berlakunya otonomi daerah maka kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan.

Di Indonesia, perguruan tinggi negeri (PTN) diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan status pengelolaan dan kemandirian, yaitu Satuan Kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). PTN Satker sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, di mana segala kegiatan akademik dan non-akademik diatur langsung oleh pemerintah pusat. Perguruan tinggi tipe BLU memiliki fleksibilitas yang lebih besar, terutama

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jogjakarta: Arusmedia, 2010), 23.

<sup>11</sup> Gunawan Sudarmanto, *Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bhineka Karya, 2012), 19.

<sup>12</sup> H.A.R Tilar. *Membebani Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 102.

<sup>13</sup> Abu Bakar & Taufani C, *Manajemen Keunagan dalam Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 24.

dalam pengelolaan keuangan. Mereka dapat mengelola pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti layanan pendidikan dan penelitian, dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Sedangkan PTN BH memiliki otonomi yang paling luas, termasuk dalam hal akademik, keuangan, dan pengelolaan sumber daya. PTN BH berhak membuat keputusan strategis secara mandiri untuk mengembangkan institusi dan bersaing di kancah internasional, meskipun tetap diawasi oleh pemerintah untuk menjaga akuntabilitas. Ketiga tipe ini memungkinkan perguruan tinggi untuk beradaptasi sesuai dengan visi dan misi institusi serta tuntutan pembangunan nasional.

Perguruan tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan tinggi yang lebih mandiri dan fleksibel, terutama dalam pengelolaan keuangan. Status ini memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola pendapatan yang dihasilkan dari layanan akademik maupun non-akademik secara lebih optimal tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Dalam konteks penelitian, perguruan tinggi BLU diharapkan mampu menjadi pusat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan meningkatkan kontribusi terhadap penelitian yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi tipe BLU terus berupaya mengembangkan budaya riset yang kuat melalui kemitraan dengan pemerintah, industri, dan berbagai pihak lain guna menjawab tantangan-tantangan regional, nasional, dan global.

Perguruan tinggi tipe Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dibandingkan perguruan tinggi yang berstatus Satuan Kerja (Satker). Dengan status ini, universitas memiliki kesempatan untuk mengelola pendapatan sendiri dari berbagai sumber, seperti biaya pendidikan, layanan masyarakat, dan kerjasama dengan industri, namun tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), sebagai salah satu perguruan tinggi umum berstatus BLU, dihadapkan pada tantangan untuk memaksimalkan pengelolaan pembiayaan guna meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci

dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan praktik manajemen pembiayaan di Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai perguruan tinggi tipe BLU, guna mengidentifikasi peluang dan hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan daya saing dan kualitas layanan akademik serta non-akademik.

Sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), Universitas Singaperbangsa Karawang Universitas Singaperbangsa Karawang menghadapi sejumlah permasalahan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah terkait manajemen pembiayaan, di mana Universitas Singaperbangsa Karawang harus mampu mengelola pendapatan mandiri secara efektif dan efisien tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Kendati memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaan dana, perguruan tinggi ini perlu memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk berbagai sektor, seperti pengembangan sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pengelolaan keuangan yang kurang optimal dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan akademik dan kegiatan riset.

Selain itu, penguatan tata kelola internal menjadi tantangan lain bagi Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai BLU. Status BLU menuntut universitas untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana. Sistem manajemen yang belum sepenuhnya terintegrasi serta koordinasi yang kurang efisien antara berbagai unit di dalam universitas dapat menghambat pencapaian tujuan institusi. Universitas juga harus terus beradaptasi dengan regulasi pemerintah yang mengawasi perguruan tinggi BLU agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya pemanfaatan potensi kerjasama dengan pihak eksternal, seperti industri, lembaga riset, dan pemerintah daerah. Meskipun Universitas Singaperbangsa Karawang memiliki peluang untuk menjalin kemitraan strategis guna meningkatkan pendapatan dan kualitas pendidikan, belum semua potensi ini dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan program akademik dan non-

akademik yang inovatif serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari realisasi belanja Universitas Singaperbangsa Karawang yang belum maksimal berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dimana Universitas Singaperbangsa Karawang untuk tahun 2023 realisasi belanja total keseluruhan hanya 80,56% dengan rincian di bawah ini :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA

## REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	53,741,853,000	40,800,671,000	2,486,599,000	0	0	0	0	0	0	97,029,123,000
		REALISASI	51,675,521,314 (96.16%)	35,789,898,639 (87.72%)	2,123,785,007 (85.41%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89,589,204,960 (92.33%)
		SISA	2,066,331,686	5,010,772,361	362,813,993	0	0	0	0	0	0	7,439,918,040
2	(F) BADAN LAYANAN UMUM	PAGU	0	95,575,876,000	33,295,870,000	0	0	0	0	0	0	128,871,746,000
		REALISASI	0.00%	77,349,433,390 (80.93%)	15,054,289,438 (45.21%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92,403,722,828 (71.70%)
		SISA	0	18,226,442,610	18,241,580,562	0	0	0	0	0	0	36,468,023,172
GRAND TOTAL		PAGU	53,741,853,000	136,376,547,000	35,782,469,000	0	0	0	0	0	0	225,900,869,000
		REALISASI	51,675,521,314 (96.16%)	113,139,332,029 (82.96%)	17,178,074,445 (48.01%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	181,992,927,788 (80.56%)
		SISA	2,066,331,686	23,237,214,971	18,604,394,555	0	0	0	0	0	0	43,907,941,212

**Gambar 1.1 Realisasi Belanja Per Sumber Dana Universitas Singaperbangsa Karawang**

Secara terperinci terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Universitas Singaperbangsa Karawang yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup semua unsur pendapatan dan belanja pada tahun 2023, Realisasi pendapatan negara pada Unaudited TA 2023 adalah Rp 143.716.696.739 yang berasal dari PNBPN atau mencapai 132% dari estimasi pendapatan LRA sebesar 108.915.240.000. Realisasi belanja negara di tahun 2023 adalah Rp 181.992.927.788 atau mencapai 80,56 % berdasarkan realisasi pendapatan Negara dan belanja Negara, surplus anggaran sebesar Rp 38.276.231.049

Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) memiliki sembilan fakultas yang berperan penting dalam mengembangkan berbagai disiplin ilmu yaitu Fakultas Ilmu Komputer memimpin dalam teknologi dan pengembangan digital, sementara Fakultas Teknik menyediakan pendidikan di bidang rekayasa dan teknologi industri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis fokus pada ilmu manajemen, akuntansi, dan bisnis yang aplikatif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mendalami studi sosial, politik, dan pemerintahan, sedangkan Fakultas Hukum menyiapkan para ahli di bidang hukum dan peradilan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) mempersiapkan tenaga pendidik yang kompeten, dan Fakultas Pertanian mengembangkan keilmuan di bidang agrikultur. Fakultas Agama Islam (FAI) menawarkan kajian agama dan pengembangan moral, serta Fakultas Kesehatan yang mendidik calon-calon mahasiswa dengan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan keberagaman ini, Universitas Singaperbangsa Karawang berupaya mencetak lulusan yang siap bersaing di berbagai bidang keahlian.

Untuk lebih menfokuskan dan lebih terarah pada penelitian ini, maka peneliti memilih Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian mengenai manajemen pembiayaan berbasis hasil pada Perguruan Tinggi Negeri Tipe Badan Layanan Umum yang difokuskan di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan keuangan dalam mendukung kegiatan akademik dan pengembangan institusi berbasis hasil di fakultas ini. Sebagai bagian dari perguruan tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU), FAI memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti biaya pendidikan, hibah, dan kerjasama eksternal, guna menunjang hasil yang telah ditetapkan.

Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Singaperbangsa Karawang memiliki keunikan terkait dengan aspek administratif dan legalitasnya. Meskipun semua program studi (prodi) di FAI mendapatkan izin dari Kementerian Agama (Kemenag), fakultas ini secara struktural berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Hal ini menciptakan perpaduan unik dalam

pengelolaan akademik dan regulasi bahkan pembiayaan, karena FAI mengikuti pedoman Kemenag dalam hal substansi seperti penamaan program studi, kurikulum bahkan penerimaan mahasiswa baru tetapi dalam hal SDM dan pembiayaan FAI Unsika tetap menjalankan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek.

Selain itu, FAI Unsika menjadi Fakultas dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak yaitu 1687 mahasiswa dengan rincian S1 Pendidikan Agama Islam sebanyak 896 mahasiswa, S1 Manajemen Pendidikan Islam sebanyak 596 mahasiswa, Pendidikan Islam Anak Usia Dini 178 mahasiswa dan S2 Pendidikan Agama Islam 44 mahasiswa. Pada tahun 2024 FAI Unsika menerima 506 mahasiswa dari berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru yaitu (a) Jalur SPAN sebanyak 108 mahasiswa; (b) Jalur UMPTKIN sebanyak 359 mahasiswa; (c) Jalur Prestasi sebanyak 6 orang dan (d) Jalur SMM PTN Barat sebanyak 37 orang. Ini menandakan jika FAI Unsika masih banyak diminati oleh Masyarakat khususnya Masyarakat Karawang dan sekitarnya.

Kode	Nama Program Studi	Status	Jenjang	Akreditasi	Data Pelaporan Tahunan					Rasio Dosen / Mahasiswa
					Jumlah Dosen Penghitung Rasio	Jumlah Dosen Homebase			Jumlah Mahasiswa	
						NIDN	NIDK	Total		
86231	Manajemen Pendidikan Islam	Aktif	S1	B	31	10	1	11	596	1:19.23
86130	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S2	Baik Sekali	1	9	1	10	44	1:44
86208	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S1	B	39	15	1	16	896	1:22.97
88201	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Aktif	S1	B	24	19	0	19	636	1:26.5
88203	Pendidikan Bahasa Inggris	Aktif	S1	B	38	25	0	25	680	1:17.89
86233	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Aktif	S1	B	0	8	0	8	178	-

### Gambar 1.2 Prodi yang berada di FAI Unsika pada Laman Pddikti

Penelitian ini menjadi penting karena manajemen pembiayaan yang efisien akan berdampak langsung pada kualitas program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Fakultas Agama Islam. Selain itu,

kajian ini juga dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana, termasuk keterbatasan sumber daya atau ketergantungan pada anggaran pemerintah, serta mencari solusi untuk memperkuat kemandirian finansial fakultas. Dalam konteks pendidikan agama, manajemen pembiayaan yang baik akan memungkinkan Fakultas Agama Islam untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mencetak lulusan yang kompeten di bidang agama dan moralitas, serta menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi mendapat perhatian terutama dari kalangan pemerhati pendidikan, perhatian tersebut bukan hanya dari segi kurikulum, mutu akademik dan lulusan saja, tetapi dari segi manajemen dan pengelolaan pembiayaan pendidikan tinggi terutama di Fakultas Agama Islam menimbulkan beberapa masalah diantaranya adalah mahasiswa yang berasal dari program studi yang izinnnya bukan berasal dari Kemendikbudristek tidak bisa mengikuti program beasiswa dan kampus Merdeka juga beberapa program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, begitupun dosen yang rata-rata lulusan dari program studi keilmuan Agama Islam susah bersaing dalam hal mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kemdikburistek. Selain itu, penamaan program studi yang ada di Fakultas Agama Islam yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek.

Masalah pembiayaan harus dipecahkan jika ingin mendapatkan peluang yang maksimal bagi semua penyelenggaraan pendidikan di Fakutas Agama islam yang bermutu agar dapat berkembang. Untuk pengembangan program pendidikan secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelolaan lembaga pendidikan. Selain itu, dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan sehingga sumber daya yang berupa uang dapat diberdayakan secara optimal<sup>14</sup>, program yang telah direncanakan harus berjalan sesuai dengan rencana, “semakin banyak kegiatan yang dilakukan untuk

---

<sup>14</sup> Gunawan Sudarmanto, *Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bhineka Karya, 2012), 34.

meningkatkan mutu maka semakin banyak dana yang dibutuhkan”<sup>15</sup>.

Dengan jumlah mahasiswa yang banyak tersebut tentunya menghasilkan pemasukan yang banyak pula, jika melihat dari data awal dana yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa di FAI Universitas Singaperbangsa Karawang adalah berdasarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mulai UKT 1 yaitu Rp 500.000,00 sampai UKT 8 yaitu Rp 4.400.000,00 dengan nominal yang beragam pula. Dalam observasi awal tentang masalah pembiayaan di FAI adalah masih terdapat pengembalian dana yang sudah dianggarkan karena tidak terpakai, contohnya pada tahun 2023 dana untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mahasiswa dan Seminar Internasional sejumlah Rp.300.000.000 tidak terpakai dan harus dikembalikan walaupun sudah masuk nominatifnya karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini tentunya merupakan sebuah permasalahan yang menunjukkan jika manajemen pembiayaan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang harus segera dibenahi.

Manajemen pembiayaan di Fakultas Agama Islam memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan hasil yang optimal untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Singaperbangsa Karawang. Indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana institusi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan institusi. Pertama, dalam kategori pendidikan, IKU mencakup rasio lulusan tepat waktu, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, serta akreditasi program studi yang mencerminkan kualitas akademik.

Kedua, untuk aspek penelitian, IKU meliputi jumlah publikasi di jurnal internasional terakreditasi, jumlah paten yang dihasilkan, dan tingkat kolaborasi dengan institusi lain dalam penelitian. Ketiga, indikator pengabdian kepada

---

<sup>15</sup> Syaiful bahri & Aswan Zain, *Strategi Perencanaan Mengajar*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 12.

masyarakat mencakup jumlah program yang dilaksanakan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta dampak sosial yang dihasilkan dari program-program tersebut. Terakhir, dalam kategori sumber daya manusia, IKU mencakup rasio dosen berkualifikasi S3, tingkat pelatihan dan pengembangan profesional yang diterima oleh staf, serta kepuasan dosen terhadap lingkungan kerja. Dengan rincian IKU yang jelas, perguruan tinggi dapat lebih mudah melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang berdampak pada peningkatan kualitas keseluruhan institusi.

Dalam konteks ini, pembiayaan yang efektif menjadi landasan untuk menjalankan program-program akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Namun, Fakultas Agama Islam sering kali menghadapi tantangan dalam hal alokasi dana yang terbatas dan kebutuhan pendidikan yang terus meningkat. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika lembaga pendidikan harus memenuhi semua target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tinggi di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, penelitian dan upaya peningkatan manajemen pembiayaan menjadi sangat krusial untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan hasil di Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang.

Salah satu masalah utama dalam manajemen pembiayaan di Fakultas Agama Islam adalah kesenjangan antara kebutuhan operasional dengan dana yang tersedia. Banyak fakultas yang bergantung pada dana dari pemerintah, yang kadang kala tidak mencukupi untuk mendanai seluruh program pendidikan, termasuk pengadaan fasilitas, pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, dan kegiatan penelitian. Ketidalcukupan dana ini dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan karena berbagai program yang direncanakan mungkin tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dampaknya, kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa bisa terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi output lulusan dari fakultas tersebut.

Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Di beberapa fakultas, terdapat praktik-praktik yang kurang transparan dalam pengalokasian dana, yang dapat

menyebabkan inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak dimanfaatkan secara optimal, dan bahkan bisa terbuang sia-sia. Ini tidak hanya merugikan fakultas secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga di mata publik dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana yang ada digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Fakultas Agama Islam perlu mengembangkan strategi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendanaan menjadi salah satu solusi yang bisa diambil, seperti menjalin kerjasama dengan pihak swasta, alumni, dan organisasi keagamaan. Dengan memperluas sumber pendanaan, fakultas dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan dana untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pengelolaan dana yang profesional dan berorientasi pada hasil dapat membantu fakultas dalam memaksimalkan potensi dari setiap dana yang diterima.

Inovasi dalam teknologi keuangan juga bisa menjadi solusi dalam manajemen pembiayaan. Penggunaan sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu fakultas dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi anggaran secara lebih efisien. Sistem ini memungkinkan fakultas untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana, sehingga setiap pengeluaran dapat dipantau dan dievaluasi secara real-time. Selain itu, teknologi juga memungkinkan transparansi yang lebih tinggi, di mana stakeholder dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan dana dan kontribusi mereka terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Manajemen pembiayaan berbasis hasil yang efektif merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Agama Islam. Tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan dana dan kurangnya transparansi, memerlukan strategi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan baru dalam pengelolaan dana, diversifikasi sumber pendanaan, dan memanfaatkan teknologi keuangan, Fakultas Agama Islam dapat menciptakan sistem manajemen

pembiayaan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan utama lembaga, yaitu menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi mahasiswa.

Berdasarkan data awal yang didapatkan tersebut, peneliti merasa sangat penting untuk melakukan penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Tipe Badan Layanan Umum dengan fokus di Fakultas Agama Islam dalam masalah manajemen pembiayaan berbasis Hasil, untuk memudahkan dan terarahnya penelitian, peneliti merumuskannya dalam judul penelitian sebagai berikut Manajemen Pembiayaan berbasis Hasil Pada Perguruan Tinggi Negeri Tipe Badan Layanan Umum (Penelitian di Universitas Singaperbangsa Karawang). Adapun keunggulan/ *novelty* penelitian ini merupakan model penelitian pertama di Perguruan Tinggi Negeri Tipe Badan Layanan Umum khususnya di Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang yang membahas manajemen pembiayaan berbasis hasil dengan memakai teori dari Thomas H. Jhones.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan di fakultas keagamaan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan pembiayaan di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum ?
2. Bagaimanakah penyusunan anggaran di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum?
4. Bagaimanakah pengawasan pembiayaan Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum ?
5. Bagaimanakah dampak manajemen pembiayaan berbasis hasil di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum
2. Untuk mengetahui penyusunan anggaran di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum
4. Untuk mengetahui pengawasan pembiayaan di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum
5. Untuk mengetahui dampak manajemen pembiayaan berbasis hasil di Perguruan Tinggi Tipe Badan Layanan Umum

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama yang berperan dalam dunia pendidikan, Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoriti penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan untuk menjadi bahan kajian dan bahan penelitian selanjutnya. Terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, bagaimana manajemen pembiayaan berbasis hasil pada perguruan tinggi negeri tipe badan layanan umum, karena pelaksanaan pembiayaan itu sulit untuk ditemukan di perguruan tinggi lainnya. Sehingga hal ini bermanfaat bagi praktisi pendidikan di perguruan tinggi.
2. Secara praktis: untuk memberikan gambaran tentang efektif dan efesiennya dalam pengelolaan pembiayaan dan dapat memberikan pengetahuan, upaya untuk memajukan lembaga pendidikan menjadi bermutu. Dapat memberikan konsep serta alanisa tentang pentingnya mengelola dana yang ada untuk meningkatkan mutu sehingga bisa menarik minat masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Manajemen pembiayaan berbasis hasil di Perguruan Tinggi Negeri Tipe Badan Layanan Umum meliputi perencanaan pembiayaan, penyusunan anggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan.<sup>16</sup> Kata biaya dalam pendidikan jika diimplementasikan merupakan sebuah proses sehingga disebut dengan pembiayaan. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dari kata asli biaya ditambah awalan *pe* dan akhiran *an*.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikbertakan upaya pendistribusikan benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan<sup>17</sup>

Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan professional guru, pengadaan sarana-parsarana Pendidikan, perbaikan ruang pengadaan kelas, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan<sup>18</sup>. Dari pengertian di atas pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kegiatan dalam pendidikan baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung.

Pendidikan yang bermutu merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik untuk

---

<sup>16</sup> Thomas, H. Jones, *Introduction to School Finance; Technique and Social Policy* (New York : Macmillan Publishing, 1985).

<sup>17</sup> Mulyono, *Pembiayaan pendidikan*, (Jakarta: Bina Cipta, 2010), 10.

<sup>18</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 12.

meningkatkan pendidikan yang bermutu di era 4.0.

Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana prasarana. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta biaya yang mencakup biaya investasi (biaya untuk keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku- bukudan biaya operasional baik untuk personil maupun nonpersonil). Biaya untuk personil antara lain untuk kesejahteraan dan pengembangan profesi, sedangkan untuk biaya nonpersonil berupa pengadaan bahan dan ATK, pemeliharaan, dan kegiatan pembelajaran.

Suatu lembaga untuk memiliki tenaga kependidikan yang berkualitas dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan memerlukan biaya rekrutmen, penempatan, penggajian, pendidikan dan latihan, serta mutasi. Dalam usaha pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit, bahkan setelah diadakan maka diperlukan dana untuk perawatan, pemeliharaan, dan pendaayagunaannya. Meskipun ada tenaga, ada sarana dan prasarana untuk memanfaatkan dan mendayagunakan secara optimal perlu biaya operasional baik untuk bahan dan ATK habis pakai, biaya pemeliharaan, maupun pengembangan personil agar menguasai kompetensi yang dipersyaratkan.

Dari uraian di atas jelas bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan perlu biaya, paling tidak memenuhi pembiayaan untuk memberikan standar pelayanan minimal. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara operasional yang dimaksud penulis dalam judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah suatu penelitian ilmiah untuk memperoleh keterangan dan data-data mengenai bagaimana perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan yang ada di Perguruan Tinggi Negeri Tipe Badan Layanan Umum khususnya di Fakultas Agama Islam.

Manajemen pembiayaan merupakan elemen krusial dalam konteks ini, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk

memastikan tersedianya sumber daya yang cukup guna mendukung berbagai program akademik dan non-akademik. Ini mencakup alokasi dana untuk pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pengajar, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta investasi dalam teknologi pendidikan yang relevan. Selain itu, manajemen pembiayaan yang baik juga melibatkan perencanaan yang strategis untuk mendapatkan sumber pendanaan, baik dari pemerintah, swasta, maupun lembaga donor, serta transparansi dalam penggunaan dana untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan yang tepat tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang keagamaan Islam

Perencanaan pembiayaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk mengatur perencanaan sumber daya pada masa yang akan datang. Setelah perencanaan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan pembiayaan secara berdaya guna dan dengan kebijakan yang sah. Tindakan yang berdaya guna dapat diukur dari kemampuan menggunakan sumber daya secara efisien untuk memperoleh hasil yang maksimal, sedangkan dengan kebijakan yang sah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam merancang dan menyusun anggaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya masalah efektivitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi. Efektivitas pembiayaan merupakan faktor penting yang senantiasa diperhitungkan bersamaan dengan efisiensi. Artinya, suatu program kegiatan tidak hanya menghitung waktu yang singkat, tetapi tidak memperhatikan anggaran yang harus dikeluarkan seperti biaya operasional dan dana pemeliharaan sarana yang mengarah pada pemborosan. Semua pihak yang terlibat dalam menentukan anggaran pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan yang riil dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu.

Dalam melakukan pelaksanaan pembiayaan pendidikan tersebut harus digolongkan menurut suatu aturan tertentu yang baku dan transaksi-transaksi

pembiayaan yang dilakukan harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Kegiatan ini disebut sebagai pembukuan dalam pembiayaan pendidikan. Setelah pembukuan selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengawasan dan penilaian pembiayaan yang harus dilakukan secara preventif dan objektif.

Penelitian yang dilakukan di Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang, didasarkan bahwa dalam mengelola pembiayaan dituntut untuk lebih *manageable* dalam hal mengembangkan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitas pendidikannya. Karena itu, Fakultas Keagamaan Islam yang dikelola secara tepat arah dapat menjadikan dirinya sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat. Pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang mengaitkan pembiayaan dengan pencapaian hasil atau kinerja tertentu. Pendekatan ini menekankan pada pemberian dana atau alokasi sumber daya berdasarkan capaian atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, Fakultas akan menerima dana tambahan jika mencapai indikator kinerja seperti peningkatan nilai akademik, angka kelulusan, atau efisiensi penggunaan anggaran. Tujuan dari manajemen pembiayaan berbasis hasil adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, mendorong efektivitas, serta memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan mengatur berbagai aspek terkait pembiayaan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Tujuan dari peraturan ini adalah menyediakan pedoman mengenai standar pembiayaan pendidikan untuk memastikan penggunaan dana pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan ruang lingkupnya berlaku untuk semua jenis pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 Standar Pembiayaan Pendidikan menetapkan standar biaya yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk biaya operasional, biaya fasilitas, dan biaya tenaga pendidik. Selain itu dijelaskan juga jika alokasi dana yang

mengatur alokasi dana dari pemerintah dan sumber lain untuk berbagai jenis pendidikan dan kegiatan pendidikan.

Selain itu sumber dana yang dapat mengidentifikasi berbagai sumber dana pendidikan, termasuk dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan, dan biaya pendidikan dari peserta didik. Pengelolaan Dana yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan dana yang harus diikuti untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 bertujuan untuk menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.

Akuntabilitas dan siasat perolehan dana dari sumber lain, menjadi penting untuk memelihara kelangsungan dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Dengan kata lain, Perguruan Tinggi Negeri Tipe Badan Layanan Umum harus memiliki strategi yang cerdas untuk membiayai penyelenggaraan pendidikannya sehingga menjadi perguruan tinggi yang bermutu yang dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain baik di tingkat regional maupun nasional. Pada tataran operasionalnya, strategi yang dimaksud terkait dengan perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan pembukuan dan pengawasan pembiayaan terhadap sumber-sumber dan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan sehingga kinerja sistem pendidikannya senantiasa terjamin dan menghasilkan Pendidikan yang bermutu dan bersaing global karena pendidikan yang bermutu mampu mengembangkan kualitas dan kompetensi mahasiswa, baik akademik, personal, maupun sosial, yang dilandasi oleh nilai-nilai akhlak mulia dan kecakapan hidup. Pendidikan yang bermutu juga mampu menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa.

Semua aspek manajemen pembiayaan tersebut dampaknya adalah kepada hasil yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana institusi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU ini biasanya mencakup beberapa aspek, seperti kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat. Misalnya, dalam konteks pendidikan, indikator dapat meliputi rasio lulusan tepat waktu, kepuasan mahasiswa, serta akreditasi program studi. Di sisi penelitian, jumlah publikasi di jurnal terakreditasi dan kontribusi terhadap inovasi teknologi juga sering dijadikan indikator. Selain itu, indikator pengabdian kepada masyarakat dapat mengacu pada jumlah program yang berhasil dilaksanakan dan dampak sosial yang dihasilkan. Dengan menggunakan IKU yang relevan, perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan kontribusinya kepada masyarakat. Untuk lebih ringkasnya, kerangka berpikir penelitian ini dapat penulis sajikan seperti di bawah ini :



**Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Penelitian**

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam berbagai aspek penelitian akademik dan praktis. Berikut ini adalah beberapa dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

### **1. Penelitian Cheng, Y., & Wu, T. (2019)**

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Wu (2019) berjudul *"Financial Autonomy and Accountability in Higher Education Institutions: A Comparative*

*Study of Public Universities"* International Journal of Educational Management, mengeksplorasi bagaimana universitas-universitas negeri di berbagai negara menerapkan otonomi keuangan sekaligus mempertahankan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat fleksibilitas keuangan yang diberikan kepada perguruan tinggi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah di masing-masing negara. Universitas yang diberikan lebih banyak otonomi finansial cenderung lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, namun mereka juga menghadapi tantangan dalam menjaga akuntabilitas publik.

Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara otonomi keuangan dan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran publik, serta peran pemerintah dalam mengawasi dan mendukung universitas dalam kerangka kebijakan yang fleksibel tetapi tetap akuntabel. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kedua studi yang sama-sama membahas manajemen keuangan di perguruan tinggi negeri yang memiliki otonomi, khususnya dalam konteks Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Kedua penelitian sepakat bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan memungkinkan perguruan tinggi untuk lebih efisien dan inovatif dalam menjalankan fungsi akademik dan non-akademik. Baik Cheng dan Wu maupun penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik meskipun institusi diberi otonomi.

Namun, terdapat perbedaan dalam konteks geografis dan pendekatan. Penelitian Cheng dan Wu menggunakan pendekatan komparatif lintas negara, membandingkan praktik pengelolaan keuangan di universitas negeri di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Sebaliknya, penelitian ini lebih fokus pada satu negara dan satu jenis perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi BLU di Indonesia, dengan studi kasus pada Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Cheng dan Wu juga lebih luas dalam cakupan karena mereka meneliti berbagai kebijakan keuangan internasional, sedangkan penelitian ini lebih mendalam dalam mengkaji bagaimana kebijakan BLU diterapkan di Indonesia terutama di Fakultas Agama Islam.

## **2. Penelitian Rachman Firdaus**

Rachman Firdaus (2017) dengan judul penelitian "*Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Swasta (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella)*", Penelitian yang dilakukan oleh Rachman Firdaus ini adalah menjelaskan tentang bagaimana sebuah lembaga swasta dalam mencari sumber biaya untuk kelangsungan lembaga pendidikan swasta dimana paling besar sumber penerimaan pembiayaan adalah dari SPPsiswa yang mengikuti kursus dan sedikit bantuan dari pihak swasta. Manajemen pembiayaan yang diterapkan di lembaga pendidikan bahasa asing seperti LIA, MMC, ELS dan Cinderella adalah bertolak dari kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penyediaan dana pendidikan lembaga swasta maka diperlukan suatu strategi yang tepat dan cermat dari pihak pengelola.

Strategi yang dibutuhkan dalam menggali dana harus dilandasi oleh kemampuan manajerial, komitmen pihak terkait, dan kepercayaan yang tinggi dari semua masyarakat yang dilayani. Faktor-faktor perhitungan anggaran pendidikan, sangat kompleks karena adanya harga patokan dan pengaruh tingkat inflasi juga faktor ekonomi secara makro, seperti sosial ekonomi masyarakat, krisis moneter, tingkat inflasi, dan bencana alam, yang menimbulkan kelangkaan barang keperluan pendidikan, sehingga anggaran berubah dengan tingkat ketidakpastian. Sedangkan pemasukan dan pengeluaran dituntut seimbang, sesuai dengan acuan pemerintah, oleh sebab itu diperlukan suatu perhitungan yang mengarah kepada pendekatan kepastian anggaran.

## **3. Penelitian Junaidi**

Junaidi (2013) dengan judul penelitian "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Universitas Islam Malang*". Hasil dari penelitian ini adalah tentang manajemen pembiayaan dimana yang pertama adalah perencanaan anggaran pendidikan Universitas Islam Malang (UNISMA) disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT dengan menuangkan program- program beserta anggaran untuk masing-masing program. Yang diadakan pada sebulan sebelum tahun ajaran baru yang diadakan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan stakeholders kampus, dan keputusan rapat yang sudah di sepakati dan diputuskan oleh ketua yayasan.

Strategi Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA) ada 4 bentuk strategi yang digunakan yakni: a. strategi unit kerja mandiri, b. sumbangan dana dari yayasan dan mahasiswa, c. memiliki link dengan luar negeri, dan d. pengajuan proposal kepada pemerintah. Evaluasi pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Islam Malang dilakukan melalui empat (4) tahap yakni: 1) Evaluasi hasil kegiatan selama setahun / persemester, 2) Evaluasi hasil kinerja pegawai melalui program-program. 3) Evaluasi dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi. 4) Evaluasi analisis SWOT meliputi hasil analisa internal dan eksternal. Penelitian ini berfungsi untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Islam Malang mengelola sumber daya keuangan mereka untuk mendukung proses pendidikan dan pengembangan kampus, serta untuk memberikan rekomendasi yang berguna dalam perbaikan manajemen pembiayaan pendidikan.

#### **4. Penelitian Ferdi W.P**

Ferdi W.P (2018) dengan jurnal penelitian "*Financing Of Education, A Theoretical Study*". Jurnal ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, jenis biaya pendidikan; dan model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kajian ini dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan biaya pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, antara lain: a) kenaikan harga; b) perubahan gaji guru; c) perubahan populasi dan kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri; d) meningkatnya standar pendidikan; e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi; g) adanya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; dan h) belum ada model pembiayaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi biaya pendidikan.

Penjelasan mengenai pentingnya pembiayaan pendidikan dalam konteks teori ekonomi dan kebijakan pendidikan. Penulis mungkin mengidentifikasi

tantangan dan masalah utama dalam pembiayaan pendidikan di berbagai konteks. Mengembangkan dan membahas teori-teori utama tentang pembiayaan pendidikan serta implikasinya terhadap praktik dan kebijakan pendidikan. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat tentang pembiayaan pendidikan, serta untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem pendidikan.

### **5. Penelitian Harsono**

Harsono (2011) dengan judul penelitian “*Pengelolaan Biaya Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Darul Mutaalimin*”. Yang menarik dari penelitian ini adalah tentang biaya pendidikan di sekolah meliputi serangkaian kegiatan sekolah, pendapatan sekolah, biaya-biaya yang harus dibayar pada waktu tertentu dan pada waktu yang akan datang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan sekolah dalam menyusun pembiayaan meliputi kegiatan dan program yang harus dikerjakan oleh pihak sekolah dari waktu ke waktu secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan dan pemeriksaan. Dalam kegiatan umum pembiayaan, kegiatan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu *budgeting* (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan) dan *auditing* (pemeriksaan).

Dari segi perencanaan pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini meliputi mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan finansial, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi anggaran dan pengesahan anggaran.

Sedangkan dari segi pelaksanaan anggaran pendidikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harsono ini meliputi melakukan analisis internal dan eksternal terhadap potensi sumber dana, mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan, Menetapkan sumber dana melalui musyawarah dengan orangtua didik pada tahun

ajaran, menggalang partisipasi masyarakat melalui komite sekolah. Dan kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah *auditing* yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Selain pengawasan juga dilakukan evaluasi.

## 6. Penelitian Djuwariyah

Djuwariyah (2021) dengan judul penelitian “*Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*” Penelitian ini menjelaskan Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif, kondusif dan efisien. Manajemen pembiayaan merupakan keputusan secara keseluruhan aktivitas mengenai usaha dalam memperoleh dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sehingga dengan memperhatikan beberapa prinsip itu dana pendidikan bisa berdaya guna.

Manajemen pembiayaan pendidikan setidaknya mempunyai tiga ruang lingkup, yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*). Tiga unsur ruang lingkup ini menjadi penting untuk mengantarkan dana pendidikan supaya berdaya guna. Peningkatan mutu pendidikan adalah kemajuan yang dihasilkan dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan kualitas dan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat pendidikan sebagaimana yang telah ditargetkan. Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan menjadi niscaya untuk melahirkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, yaitu pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi

sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif, kondusif dan efisien.

Berbeda dengan hasil penelitian di atas, dalam disertasi ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti manajemen pembiayaan berbasis hasil pada perguruan tinggi negeri tipe badan layanan umum kaitannya dengan proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan sebagaimana yang telah diajukan di atas dengan lokasi penelitian di Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan dana yang baik dapat meningkatkan hasil pendidikan di fakultas keagamaan Islam, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan spesifik dan terukur tentang bagaimana suatu konsep atau variabel akan diidentifikasi, diukur, atau diimplementasikan dalam sebuah penelitian. Definisi ini mengubah konsep yang abstrak menjadi bentuk yang konkret dan dapat diuji secara empiris, sehingga peneliti dan pembaca dapat memahami dengan jelas bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Dengan menggunakan definisi operasional, peneliti menetapkan kriteria atau parameter yang jelas untuk mengamati atau mengukur variabel tersebut, yang memastikan konsistensi dan ketepatan dalam pengumpulan data. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Manajemen pembiayaan adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ini mencakup kegiatan seperti penganggaran, alokasi dana, pengelolaan arus kas, pengendalian biaya, serta evaluasi penggunaan dana untuk memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam konteks pendidikan, misalnya di Fakultas Agama Islam, manajemen pembiayaan melibatkan pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan

pemeliharaan fasilitas pendidikan, dengan tujuan utama meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan yang baik membantu memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara bijaksana, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga.

2. Perguruan tinggi negeri (PTN) adalah institusi pendidikan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, baik melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau kementerian terkait lainnya. PTN bertujuan untuk menyediakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam berbagai bidang keilmuan guna mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai lembaga publik, PTN mendapatkan pendanaan sebagian besar dari anggaran negara, meskipun beberapa juga memperoleh pendapatan dari sumber lain seperti kerjasama dengan industri, riset, dan layanan publik. PTN memiliki berbagai status pengelolaan, termasuk Satuan Kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), yang masing-masing memiliki tingkat kemandirian dan fleksibilitas berbeda dalam mengelola keuangan dan pengambilan keputusan.
3. Tipe Badan Layanan Umum (BLU) adalah status pengelolaan yang diberikan kepada lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi, yang memungkinkan mereka mengelola keuangan secara lebih fleksibel dibandingkan dengan Satuan Kerja (Satker). BLU memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan yang diperoleh dari layanan yang mereka berikan, seperti biaya pendidikan, riset, atau layanan konsultasi, tanpa harus mengikuti prosedur keuangan negara yang ketat. Meskipun demikian, BLU tetap berada di bawah pengawasan pemerintah dan harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Status ini memberi BLU kemampuan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan lebih cepat karena mereka dapat menggunakan pendapatan mandiri untuk mendukung operasional dan pengembangan institusi tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah pusat.

4. Fakultas Keagamaan Islam adalah salah satu fakultas di perguruan tinggi yang fokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang studi agama Islam. Fakultas ini biasanya menawarkan berbagai program studi yang terkait dengan ilmu-ilmu keislaman, seperti studi Al-Qur'an dan Hadis, Fiqih, Teologi Islam (Aqidah), Pendidikan Agama Islam, Sejarah Peradaban Islam, Hukum Islam (Syariah), dan Bahasa Arab. Fakultas Agama Islam bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai profesi. Selain itu, fakultas ini juga berperan dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan sosial, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui program-program pengabdian yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Fakultas ini biasanya terdapat di perguruan tinggi yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan Islam, seperti universitas Islam negeri (UIN), institut agama Islam negeri (IAIN), atau perguruan tinggi swasta yang memiliki fokus pada pendidikan keagamaan Islam.
5. Perencanaan pembiayaan adalah proses sistematis dalam menentukan kebutuhan dana, sumber pendanaan, alokasi, dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang suatu organisasi atau proyek. Perencanaan ini melibatkan pengidentifikasian kebutuhan keuangan, pengkajian sumber-sumber pendanaan yang potensial, serta pengembangan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Dalam konteks organisasi, seperti lembaga pendidikan atau perusahaan, perencanaan pembiayaan mencakup beberapa langkah, termasuk:
  - (a) Estimasi Kebutuhan Dana: Menentukan berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, proyek, atau operasi sehari-hari.
  - (b) Identifikasi Sumber Pendanaan: Mengidentifikasi sumber dana yang dapat digunakan, seperti pendapatan internal, investasi, pinjaman, hibah, atau sumbangan.
  - (c) Pengalokasian Dana: Menentukan bagaimana dana akan dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, pengadaan barang, atau pembayaran utang.
  - (d)

Pengelolaan Risiko Keuangan: Mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan merencanakan cara untuk mengatasinya, seperti menjaga likuiditas atau memitigasi risiko utang. (e) Penyusunan Anggaran: Membuat anggaran yang mencerminkan rencana keuangan secara rinci, mencakup pendapatan dan pengeluaran yang diantisipasi. Dan (f) Evaluasi dan Penyesuaian: Secara berkala meninjau dan menyesuaikan rencana pembiayaan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan organisasi, atau hasil evaluasi sebelumnya. Perencanaan pembiayaan yang baik membantu memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuannya, mengelola risiko dengan baik, dan memanfaatkan dana secara efisien dan efektif.

6. Penyusunan anggaran pendidikan adalah proses perencanaan dan pengelolaan alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan di sektor pendidikan. Proses ini melibatkan pembuatan rencana keuangan yang mendetail untuk mendukung kegiatan operasional, pengembangan, dan program-program pendidikan di lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau institusi pendidikan lainnya. Penyusunan anggaran pendidikan yang efektif membantu lembaga pendidikan dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah tahap implementasi dari rencana anggaran pendidikan yang telah disusun. Ini melibatkan penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, serta pengelolaan dan pemantauan keuangan untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efisien dan akuntabel.
8. Pengawasan pembiayaan pendidikan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak penggunaan dana dalam sektor pendidikan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa dana

yang dialokasikan dan digunakan dalam kegiatan pendidikan memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian pembiayaan pendidikan yang efektif membantu lembaga pendidikan dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal.

9. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau institusi, termasuk perguruan tinggi. IKU bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam konteks perguruan tinggi, IKU sering mencakup berbagai aspek seperti: (1) Kualitas Pendidikan: Mengukur keberhasilan proses pembelajaran, termasuk tingkat kelulusan, kepuasan mahasiswa, dan akreditasi program studi. (2) Penelitian: Menilai kontribusi perguruan tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi, seperti jumlah publikasi ilmiah, paten, dan kolaborasi penelitian. (3) Pengabdian kepada Masyarakat: Mengukur dampak program-program yang dilaksanakan di masyarakat, termasuk partisipasi masyarakat dan keberhasilan program. (4) Sumber Daya Manusia: Mengukur kualifikasi dan kepuasan dosen serta tenaga kependidikan, termasuk jumlah dosen dengan gelar doktor dan pelatihan yang diterima. Dengan menggunakan IKU yang relevan dan terukur, perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek operasional dan akademik.